

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu pemanasan global saat ini mendapat perhatian yang cukup signifikan bagi masyarakat internasional. Hal ini dikarenakan dampak dari pemanasan global yang mulai dirasakan oleh masyarakat secara langsung, diantaranya adalah peningkatan suhu permukaan bumi dan perubahan cuaca yang cukup ekstrem. Menurut *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)*, rata-rata suhu permukaan global meningkat dengan laju kurang lebih 0,180-0,740 derajat selsius yang mengakibatkan perubahan iklim di berbagai tempat, termasuk di Indonesia.

Pemanasan global disebabkan oleh meningkatnya emisi gas rumah kaca dalam atmosfer yang melebihi dari standar normal. Gas rumah kaca menangkap radiasi inframerah dari matahari, kemudian memantulkannya ke bumi dan menahan radiasi tersebut di permukaan bumi, sehingga suhu permukaan bumi meningkat (id.wikipedia.org). Gas rumah kaca terdiri dari beberapa macam senyawa yang didominasi oleh senyawa karbon. Karbon, timbul dari berbagai proses alami dan juga dari proses pembakaran bahan bakar fosil dan limbah padat. Berdasarkan data IPCC, kadar karbon di udara meningkat 0,72% setelah terjadi revolusi industri, maka dari itu sektor industri menjadi sektor yang paling bertanggung jawab dalam peningkatan karbon yang menyebabkan pemanasan global saat ini. Hal tersebut diperkuat

oleh opini Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat, yang menyatakan bahwa sektor industri berkontribusi sebesar 12,75% dari 1,3 juta gigagram emisi karbon yang mencemari atmosfer Indonesia (Tempo.co).

Masyarakat internasional semakin sadar akan dampak peningkatan emisi karbon, hal itu terlihat semenjak ditandatanganinya Protokol Kyoto pada 15 Maret 1999. Protokol Kyoto adalah sebuah persetujuan internasional mengenai pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini, berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, dan/atau bekerja sama dalam perdagangan emisi karbon dalam rangka menjaga jumlah emisi karbon untuk mengurangi dampak pemanasan global. Indonesia sendiri telah meratifikasi Protokol Kyoto melalui UU No. 17 Tahun 2004. Ratifikasi Protokol Kyoto dilakukan dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan serta ikut ambil bagian dalam upaya menurunkan emisi karbon. Indonesia pun telah berkomitmen mengurangi emisi karbon yang merupakan bagian dari emisi gas rumah kaca sebanyak 26 persen pada tahun 2020, yaitu kurang lebih sebanyak 0,767 gigaton.

Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon terlihat dari diberlakukannya Perpres No. 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional dan Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Pada pasal 15 Perpres No. 71 Tahun 2011 secara spesifik menjelaskan bahwa, Seluruh pelaku usaha dari kegiatan yang secara potensial menimbulkan emisi

dan/atau menyerap gas rumah kaca (termasuk karbon), wajib melaporkan data-data terkait inventarisasi gas rumah kaca kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya satu kali dalam setahun.

Inventarisasi gas rumah kaca adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi gas rumah kaca secara berkala dari berbagai sumber emisi dan sumber penyerapnya termasuk simpanan karbon. Inventarisasi gas rumah kaca yang dilakukan oleh perusahaan dapat diketahui dari pengungkapan emisi karbon (*carbon emission disclosure*) yang ada dalam laporan tahunan dan atau *sustainability report*.

Carbon emission disclosure di Indonesia masih merupakan *voluntary disclosure* dan praktiknya masih jarang dilakukan oleh entitas bisnis (Jannah dan Muid, 2014). Menurut Luo *et al.* (2013) faktor keuangan cenderung menjadi penghambat *carbon emission disclosure* pada perusahaan, khususnya pada perusahaan yang berada di negara berkembang. Hal ini dikarenakan *carbon emission disclosure* adalah bagian dari strategi iklim secara keseluruhan yang membutuhkan sumber daya keuangan, manusia dan teknologi yang cukup besar sehingga sulit untuk dipenuhi perusahaan. Perusahaan yang melakukan pengungkapan emisi karbon memiliki beberapa pertimbangan, diantaranya untuk mendapatkan legitimasi dari para *stakeholder*, meningkatkan reputasi perusahaan dan menghindari ancaman yang akan timbul karena adanya regulasi (Stanny, 2010).

Tidak semua perusahaan dituntut untuk mengungkapkan emisi karbon yang dihasilkannya, hanya perusahaan yang masuk dalam tipe industri yang intensif dalam mengeluarkan emisi karbon saja. Perusahaan yang masuk dalam tipe industri yang intensif menghasilkan emisi karbon adalah perusahaan yang mengeluarkan emisi karbon secara langsung dari aktivitas operasionalnya dan atau dari sumber daya yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang masuk dalam tipe ini menghasilkan emisi lebih besar sehingga berkewajiban mengungkapkan emisi karbon yang dikeluarkannya. Menurut Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat yang dikutip dalam Tempo.co, terdapat delapan sektor industri yang menyumbang emisi karbon dalam jumlah besar dan berkewajiban dalam mengungkapkannya, diantaranya industri semen, industri baja, industri pulp dan kertas, industri tekstil, keramik, pupuk, petrokimia, dan industri makanan dan minuman.

Menurut *Global Industry Classification Standard* (GICS) perusahaan yang intensif dalam menghasilkan emisi karbon adalah perusahaan yang masuk dalam industri energi, transportasi, material dan utilitas. GICS itu sendiri merupakan standar global yang mengkategorikan perusahaan dalam sektor-sektor dan industri-industri. GICS didesain untuk mengklasifikasikan sebuah perusahaan berdasarkan aktivitas bisnis utamanya. Tuntutan pada perusahaan yang intensif mengeluarkan karbon tersebut, memengaruhi perusahaan dalam mengungkapkan emisi karbonnya. Menurut Matsumura *et al.* (2011) perusahaan yang lebih intensif dalam menghasilkan karbon dari aktivitas operasionalnya cenderung mengungkapkan emisi karbon yang

dihasilkannya. Hal itu sejalan dengan penelitian Jannah dan Muid (2014) yang menyatakan bahwa perusahaan yang intensif dalam menghasilkan karbon, seperti energi, transportasi, material dan utilitas cenderung untuk mengungkapkan informasi karbon dibanding dengan perusahaan yang tidak intensif dalam menghasilkan karbon dari aktivitas operasionalnya seperti perusahaan keuangan. Pengungkapan tersebut dilakukan semata-mata untuk merespon peningkatan tekanan sosial dan tekanan politik (Choi *et al.*, 2013).

Selain intensitas dalam mengeluarkan emisi karbon, kinerja lingkungan suatu perusahaan juga cenderung memengaruhi perusahaan dalam mengungkapkan emisi karbon yang dikeluarkannya. Penelitian Matsumura *et al.* (2011) yang menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih proaktif terhadap lingkungan memiliki dorongan untuk mengungkapkan informasi emisi karbon secara sukarela, dalam rangka mengungkapkan kinerjanya yang tidak secara langsung diamati oleh investor dan pemangku kepentingan lainnya.

Kinerja lingkungan perusahaan yang berada di Indonesia diukur, diperingkat dan dipublikasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER). PROPER adalah program yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Peningkatan kinerja dalam pengelolaan lingkungan diharapkan terjadi melalui efek yang timbul akibat pengumuman peringkat kinerja PROPER kepada publik. Namun penelitian Jannah dan Muid (2014) tidak menemukan bukti empiris bahwa kinerja lingkungan yang diprosikan dengan PROPER memiliki pengaruh terhadap

pengungkapan emisi karbon. Penelitian Jannah dan Muid (2014) ini, justru menyimpulkan bahwa peringkat PROPER dapat mengurangi motivasi perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbon mereka.

Selain faktor tipe industri dan kinerja lingkungan, terdapat faktor lain yang memengaruhi *carbon emission disclosure*, yaitu faktor pendanaan. Pengaruh faktor pendanaan terhadap *carbon emission disclosure* muncul akibat adanya tuntutan dari pemegang saham dan kreditur selaku pemasok dana eksternal. Pemegang saham dan kreditur yang berposisi sebagai *stakeholder* menuntut informasi mengenai perusahaan (termasuk informasi mengenai jumlah emisi karbon perusahaan) untuk pertimbangan investasi dan pemberian pinjaman. Pemegang saham membutuhkan informasi tersebut untuk mengevaluasi nilai sebenarnya dari investasi yang ia berikan pada suatu perusahaan, sedangkan kreditur membutuhkan informasi tersebut untuk menilai resiko perusahaan, khususnya saat negosiasi dan renegotiasi kontrak utang sehingga mengurangi risiko dalam pemberian utang. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Peters *et al.* (2012) yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki pendanaan eksternal cenderung mengungkapkan emisi karbonnya. Hal itu disebabkan pemenuhan tuntutan informasi lingkungan khususnya emisi karbon dari pemegang saham dan kreditur oleh manajemen perusahaan.

Berbeda dengan hasil penelitian Peters *et al.*, hasil penelitian Luo *et al.* (2010) tidak menemukan bukti bahwa besarnya dana yang diberikan pemegang saham dan kreditur memiliki pengaruh terhadap keputusan

perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbonnya. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Tang dan Luo (2011) menyatakan bahwa pendanaan eksternal tidak memengaruhi pengungkapan emisi karbon.

Adanya hasil penelitian yang tidak konsisten mengenai kinerja lingkungan dan pendanaan terhadap *carbon emission disclosure* dari beberapa penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *carbon emission disclosure*. Selain itu, penelitian mengenai *carbon emission disclosure* di Indonesia masih belum banyak dilakukan, sehingga penelitian ini dapat menambah literatur dalam ilmu akuntansi di Indonesia. Penelitian mengenai *carbon emission disclosure* juga penting ketika melihat besarnya dampak yang diakibatkan oleh emisi karbon yang memengaruhi keberlangsungan hidup manusia dan ekosistemnya.

Penelitian ini, menggunakan faktor tipe industri, kinerja lingkungan dan pendanaan sebagai variabel independen, kemudian *carbon emission disclosure* merupakan variabel dependennya. Penelitian ini juga menggunakan teori legitimasi dan teori *stakeholder* dalam merumuskan hubungan dan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependennya. Hal itu dikarenakan peneliti dan literatur sebelumnya berpendapat bahwa *carbon emission disclosure* yang dilakukan suatu perusahaan semata-mata dilakukan untuk mendapatkan legitimasi dari lingkungan masyarakat dan untuk memenuhi tuntutan informasi yang diinginkan *stakeholder*-nya.

Atas dasar latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Tipe Industri, Kinerja Lingkungan dan Pendanaan Terhadap *Carbon Emission Disclosure* (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013)**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang memengaruhi *carbon emission disclosure*, yaitu sebagai berikut:

1. Rendahnya kepatuhan perusahaan di Indonesia untuk mengungkapkan emisi karbonnya terutama perusahaan yang tidak insentif mengeluarkan karbon,
2. Kurangnya motivasi bagi perusahaan di Indonesia untuk mengungkapkan emisi karbonnya,
3. Kurangnya kepedulian *stakeholder* keuangan dalam perusahaan di Indonesia terhadap dampak lingkungan, *stakeholder* cenderung mementingkan profitabilitas perusahaan saja tanpa memperdulikan dampak dari operasional perusahaan terhadap lingkungan
4. Tingginya legitimasi dari masyarakat dan pemerintah dapat mempengaruhi luas pengungkapan emisi karbon perusahaan.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ada, terlihat banyak faktor yang dapat memengaruhinya. Karena keterbatasan waktu dan biaya yang dialami oleh penulis, maka penelitian dibatasi hanya pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013 yang secara implisit maupun eksplisit mengungkapkan emisi karbon yang dikeluarkannya dalam *sustainability report* dengan menggunakan variabel dependen *carbon emission disclosure* serta variabel independen berupa tipe industri, kinerja lingkungan dan pendanaan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang menunjukkan adanya hasil penelitian yang tidak konsisten mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *carbon emission disclosure*, maka pertanyaan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah variabel tipe industri yang diukur dengan variabel dummy berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*?
2. Apakah variabel kinerja lingkungan yang diukur dengan peringkat PROPER berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*?
3. Apakah variabel pendanaan yang diukur dengan rasio pendanaan eksternal terhadap total aset berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris tentang pengaruh tipe industri, kinerja lingkungan dan pendanaan terhadap *carbon emission disclosure* di Indonesia.
 - b. Menambah literatur dan menjadi acuan penelitian pada bidang akuntansi khususnya mengenai pengungkapan karbon yang masih jarang diteliti di Indonesia. Memahami bagaimana lingkungan khususnya mengenai senyawa karbon berhubungan dengan ilmu akuntansi sebagai ilmu yang mengukur, mengkomunikasikan dan menginterpretasikan aktivitas keuangan.
 - c. Mendukung teori legitimasi dan teori *stakeholder* yang mendasari hubungan antara tipe industri, kinerja lingkungan dan pendanaan dengan *carbon emission disclosure*.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengungkapkan *carbon emission disclosure*-nya untuk ikut bergabung dalam upaya pengurangan emisi karbon.
 - b. Sebagai bahan evaluasi perusahaan untuk senantiasa menjaga hubungannya dengan lingkungan.